



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Gedongkuning No. 146 Yogyakarta

Telp. 0274-378431, Fax. 0274-378432

Laman : <https://jogja.kemenkum.go.id/>

Nomor : W14.PW.01.02-2817
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA 2025
Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

20 Januari 2025

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Kementerian Hukum RI
di –

Tempat

Menindaklanjuti Surat Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia Sek.1-PR.04.05-20 tanggal 15 Januari 2025 Tentang Matrik Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja TA 2025, Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Matrik Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja TA 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Agung Rektono Seto

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TA 2025 KANTOR WILAYAH D.I YOGYAKARTA

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)
A	BAGIAN UMUM DAN TU							
	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum program Dukungan Manajemen	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	26,868,934,000	Layanan BMN Kantor Wilayah	Pembinaan dan Pengelolaan BMN	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Monitoring Pelaporan BMN	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Pelaksanaan Kehumasan	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Layanan Protokoler	Koordinasi Keprotokoleran	TW III
							Pelaksanaan Keprotokoleran	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Fasilitasi Ketatalaksanaan	TW II, TW III
							Fasilitasi Kelembagaan	TW II, TW III
						Layanan Umum	Administrasi dan Pengelolaan Pengadaan Barjas/UKPBJ	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Pengelolaan Perpustakaan	TW III
							Pengelolaan Kesehatan Pegawai	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Operasional dan Pemeliharaan Kantor	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Layanan Sarana Internal	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	TW II, TW III
							Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	TW II, TW III
						Layanan Manajemen SDM	Administrasi Kepegawaian	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Layananan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan Perencanaan	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Layanan Penganggaran	TW I, TW II, TW III , TW IV

							Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan Pemantauan dan Evauasi Kinerja	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Rekomenasi Kinerja Program dan Kegiatan	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Penyusunan Manajemen Risiko	TW I, TW II, TW III ,
							Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Layananan Manajemen Keuangan	Pembinaan daan Pengelolaan Laporan Keuangan	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Pembinaan dan Pengeloaan Perbendaharaan	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Layanan Reformasi Kinerja	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Pembentukan Satker WBK/WBBM	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Pembangunan Budaya Anti Korupsi	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Pengelolaan Kearsipan	TW II, TW III
							Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Kearsipan	TW II, TW III

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Rencana Aksi		Timeline Renaksi	
						(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)	
A	Bidang Administrasi Hukum Umum								
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Rp. 2.439.601.000,-	Melaksanakan sosialisasi di bidang Fidusia, Notariat, Kewarganegaraan, Layanan AHU Lainnya (Perseroan Perorangan)	Sosialisasi / Diseminasi / FGD / Rakor / Seminar / Webinar / Workshop / Pendalaman Materi Layanan Fidusia	TW II	
		Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%			Sosialisasi / Diseminasi / FGD / Rakor / Seminar / Webinar / Workshop / Pendalaman Materi Layanan Kenotariatan	TW I	
							Sosialisasi/ Diseminasi/FGD/ Rakor/ Seminar/ Workshop/Pendalaman	TW III	
							Sosialisasi / Diseminasi / FGD / Rakor / Seminar / Webinar /	TW IV	
							Publikasi Layanan AHU di Wilaya	TW I	
							leaflet/brosur/poster/spanduk/dsb	TW I	
							Kalender kegiatan	TW I	
							sewa booth pameran	TW III	
							Rakor MPD MPW	TW II	
		Melaksanakan kegiatan pemeriksaan notaris oleh MPD MPW dan MKN	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan notaris oleh MPD MPW dan MKN	TW I, TW II, TW III , TW IV					
		B	Bidang Kekayaan Intelektual						
1	Penyelenggaraan Layanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Rp2,871,760,000	Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persiapan Pemberdayaan KI di Wilayah	TW I, TW II, TW III , TW IV	
							Pelaksanaan Pemberdayaan KI di Wilayah		TW I, TW II, TW III , TW IV
							Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KI di Wilayah		TW I, TW II, TW III , TW IV
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%		Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	Edukasi Pencegahan Pelanggaran HKI ke Perguruan Tinggi di Wilayah	TW I, TW II, TW III , TW IV	

		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%		Fasilitasi Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Evaluasi dan Pelaporan Layanan	TW I, TW II, TW III ,
					Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	Pengawasan dan Pemantauan di Bidang Kekayaan Intelektual di Wilayah	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Pendampingan Penanganan Aduan	TW I, TW II, TW III ,
						Evaluasi dan Pelaporan Penegakan Hukum KI di Wilayah	TW I, TW II, TW III , TW IV

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Alokasi	Rencana Aksi		Timeline Renaksi
					Anggaran (Rp)	(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)		(TW I/II/III/IV)
A	DIVISI PP DAN PEMBINAAN HUKUM							
1	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	Rp520,000	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	Persiapan Harmonisasi Perancang Peraturan Daerah	TW I, TW II, TW III , TW IV
		Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	25 orang			Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah	TW I, TW II, TW III , TW IV
					Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah		TW I, TW II, TW III , TW IV	
					Pelaporan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah		TW I, TW II, TW III , TW IV	
						Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Persiapan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	TW I, TW II
					Pelaksanaan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan		TW III	
					Pelaporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan		TW IV	
2	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan 2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	Rp148,890,000	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	Persiapan Analisis dan Evalusi Hukum	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Perumusan Rekomendasi dan Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda dan/atau Naskah Akademik	TW I, TW II, TW III , TW IV
3	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	Rp2,468,233,000	Pengelolaan JDIHN di Wilayah	Pembinaan dan Pengembangan JDIH di Wilayah	TW I, TW II, TW III , TW IV
		Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%			Promosi, Penerbitan dan Kerjasama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah	TW I, TW II, TW III , TW IV
			2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%			Pengelolaan Perpustakaan Hukum	TW I, TW II, TW III , TW IV
			Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah		70%		Layanan Penyuluh Hukum di Daerah
							Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Hukum	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok KADARKUM dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	TW I, TW II, TW III , TW IV

							Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat di Wilayah	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat di Daerah	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Pengawasan Bantuan Hukum Tingkat Daerah	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah	Persiapan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Upaya Hukum Luar Biasa	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	Penyebarluasan Informasi dan Penanganan Perkaara di Luar Pengadilan	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Konseling	TW I, TW II, TW III , TW IV
4	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Rp275,361,000	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	TW I, TW II, TW III , TW I, TW II, TW III , TW IV TW I, TW II, TW III , TW IV TW I, TW II, TW III , TW IV
							Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM	TW I, TW II, TW III , TW IV
							Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK-IKM	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IPK-IKM	TW I, TW II, TW III , TW IV
						Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah	Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah	TW I, TW II, TW III , TW IV



Kepala Kantor Wilayah,

Agung Rektono Seto